

## EVALUASI PRAKTIK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI KOTA KENDARI

**Andi Syaiful Zainal<sup>1</sup>, Riston G. Ahmad<sup>2</sup>, Murniati<sup>3</sup>, Andi Awaluddin Ma'ruf<sup>4</sup>, La Ode Abdul Harlan<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Kendari  
Correspondent author: [riston@umkendari.ac.id](mailto:riston@umkendari.ac.id)  
Kendari, Sulawesi Tenggara Indonesia

### **Abstract**

*This study evaluates government accountability practices in Kendari City as a representation of the condition of local government in Indonesia. Qualitative methods were used by involving various parties, and the results showed the Kendari City government's focus on efficiency, effectiveness, transparency, and community participation. The evaluation results are based on the use of Key Performance Indicators and Government Institutional Accountability and Performance Reports. The Kendari City Government maintains the Unqualified Fair opinion of BPK RI, even though there are indicators that have not been achieved. Policy recommendations include proactive publication, bureaucratic reform, increased transparency through financial reports, and community empowerment. This research is expected to provide guidance for stakeholders in improving accountability and quality of local governance in Kendari City.*

**Keywords: Accountability, Evaluation; Government; Public Service**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengevaluasi praktik akuntabilitas pemerintahan di Kota Kendari sebagai representasi kondisi pemerintahan daerah di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan melibatkan berbagai pihak, dan hasil penelitian menunjukkan fokus pemerintah Kota Kendari pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hasil evaluasi didasarkan pada penggunaan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Insatansi Pemerintah. Pemerintah Kota Kendari mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, meskipun terdapat indikator yang belum tercapai. Rekomendasi kebijakan mencakup publikasi proaktif, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi melalui laporan keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal di Kota Kendari.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Evaluasi; Pelayanan Publik: Pemerintah**

---

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

---

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah lokal berperan sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan (Risnawan, 2017). Pemerintahan lokal memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu aspek kritis dalam menjalankan fungsi ini adalah tingkat akuntabilitas pemerintahan, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Masyarakat akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Selly & Madubun, 2023).

Kota Kendari, sebagai entitas pemerintahan lokal, menghadapi tantangan yang berkembang dengan dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, evaluasi praktik akuntabilitas pemerintahan lokal menjadi esensial untuk memahami sejauh mana pemerintah setempat telah memenuhi standar akuntabilitas yang diharapkan dan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Penerapan akuntabilitas akan mendorong setiap pegawai pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai keberhasilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik, yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban karena akuntabilitas itu sendiri merupakan upaya untuk memberikan penjelasan terhadap kinerja dan tindakan kepada masyarakat (Tawai et al., 2023)

Pemerintahan yang bersih ditandai dengan keterkaitan tiga elemen dasar dari good governance yakni partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Sutrisna & Setiawati, 2023). Ketidaktransparan, potensi korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi beberapa masalah yang merintang akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal (Mahendra et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik akuntabilitas pemerintahan Kota Kendari sebagai gambaran representatif dari kondisi yang dihadapi oleh pemerintahan daerah di Indonesia.

Dengan memahami dan menganalisis praktik akuntabilitas pemerintahan di Kota Kendari, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi dalam merancang rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Maleong, 1989) Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menciptakan suatu pencitraan secara sistematis, berdasarkan fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu dengan akurasi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami praktik akuntabilitas pemerintahan

lokal di Kota Kendari. Penelitian ini melibatkan beragam pihak, termasuk pejabat dan aparat pemerintah Kota Kendari, warga, perwakilan LSM, dan sektor swasta, informan penelitian dipilih secara purposif untuk mencapai representasi yang holistik. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam untuk meraih pemahaman yang mendalam, observasi partisipatif untuk menggali konteks praktis (Arikunto, 2002), serta Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah interaktif yang memfasilitasi dialog antar kelompok dalam mendiskusikan pandangan mereka terhadap akuntabilitas pemerintah Kota Kendari.

Metode ini juga memanfaatkan analisis dokumen resmi, kebijakan, dan publikasi terkait tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Kota Kendari guna memperkaya pemahaman kontekstual. Data yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk wawancara, FGD, observasi, dan analisis dokumen, akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Pendekatan triangulasi data akan diterapkan untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif akuntabilitas pemerintah terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kendari

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek fundamental dalam konsep tata kelola yang baik adalah prinsip akuntabilitas. Menurut Fattah, akuntabilitas adalah keadaan di mana seseorang dinilai oleh pihak lain berdasarkan kualitas kinerjanya dalam mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Nanang, 2013).

Penguatan tata kelola pemerintahan, tidak hanya mengacu pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kebebasan demokratisasi di masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, akuntabilitas pemerintahan lokal menjadi relevan karena melibatkan tanggung jawab dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakatnya. Akuntabilitas pemerintahan lokal mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan kinerja serta tindakan

mereka kepada publik, yang sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi dan kebebasan demokratisasi yang ditekankan dalam penguatan tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja menurut Inpres nomor 7 Tahun 1999 merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) diungkapkan melalui suatu dokumen, yakni Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (LAKIP). (Loppies et al., 2023)

Pemerintah memegang kewajiban untuk membentuk suatu lingkungan yang mendukung pencapaian *Good Governance* melalui penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam menetapkan tindakan dan kebijakan mereka (Resmadiktia et al., 2023). Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *governance* yang menekankan pada kemampuan aktor-aktor, baik pemerintah, swasta, maupun NGO untuk mampu mempertanggungjawabkan berbagai hal yang telah dikerjakannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti halnya Indikator Kinerja Utama (IKU), penilaian laporan akuntabilitas, hasil audit dan penerimaan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU pemerintah Kota Kendari adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kota, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017-2022. Adapun IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, selain itu untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja (Perwali No 48 Tahun 2021 Tentang IKU)

Berikut ini adalah tabel Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kendari yang menggambarkan misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama pemerintah Kota Kendari

**Tabel 1.** Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kendari

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintahan termasuk pada bidang Informasi dan Tenolog;	Persentase aparatur struktural yang kompeten
		Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kota</li><li>2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program</li><li>3. Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 70%</li><li>4. Persentase tindak lanjut temuan</li><li>5. Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan</li></ol>
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Kepuasan Masyarakat kependudukan &amp; pencatatan sipil</li><li>2. cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan</li><li>3. Nilai Kepuasan Masyarakat atas pelayanan</li><li>4. perizinan dan non perizinan</li><li>5. Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK</li></ol>

Sumber: Perwali No 48 Tahun 2021 Tentang IKU

Selanjutnya untuk mengetahui Target dan Capaian IKU Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Informasi dapat dilihat dari tabel 2.

**Tabel 2.** Target dan Capaian IKU Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Informasi

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2021		OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi dan teknologi	Persentase aparatur structural yang kompeten	95%	90%	BKPSDM
2.	Meningkatkan tata Kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB	B	Bagian Ortala
		Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan program	95%	92%	Bappeda
		Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 75%	80%	84%	Bappeda
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase tindak lanjut temuan	80%	72%	Inspektorat
		Nilai kepuasan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil	85.50	85.50	Dinas Kependudukan dan Capil
		Cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan	100%	86%	Dinas Kependudukan dan Capil
		Nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	90%	87,85%	PTSP
		Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK	8	0	Dinas Kominfo

Sumber: LKPJ Walikota Kendari 2021

Indikator capaian keberhasilan pelaksanaan program diukur berdasarkan rata-rata realisasi target indikator program RPJMD dan Restra Perangkat Daerah. Sebagaimana dari tolok ukur tersebut dari 136 indikator program RPJMD dan Restra capaian rata-rata indikator program adalah 92%, sehingga untuk ratio capaian adalah realisasi indikator dibagi target indikator sebesar 97%. Berdasarkan ratio tersebut untuk capaian target indikator capaian keberhasilan pelaksanaan program sangat baik.

Terkait capaian indikator persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 75% diukur berdasarkan rata-rata realisasi anggaran perangkat daerah. Sebagaimana tolok ukur indikator tersebut dari 42 perangkat daerah dan sekretariat daerah capaian rata-rata realisasi anggarannya 84% tahun anggaran 2021. sehingga untuk ratio capaian adalah realisasi indikator dibagi target indikator sebesar 105%. Berdasarkan ratio capaian tersebut untuk capaian indikator persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 75% melebihi target yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, terdapat satu indikator yang tidak tercapai pada tahun 2021 yaitu jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK. Hal ini berdasarkan pertimbangan akan dilakukannya pembangunan/rehabilitasi kantor Walikota Kendari sehingga pemasangan jaringan kabel optic mengalami penundaan.

Selanjutnya Untuk melihat akuntabilitas Pemerintah Kota Kendari, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Insatansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dapat menjadi salah satu rujukan. Nilai LAKIP secara keseluruhan setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai perbandingan perencanaan dan capaian yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Kota Kendari Tahun 2022:

**Tabel 3.** Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Kota Kendari Tahun 2022

No.	Nama OPD	Nilai	Predikat
1.	Inspektorat	79,65	BB
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78,45	BB
3.	RSUD Kendari	77,90	BB
4.	Sekretariat Daerah	77,10	BB
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,60	BB
6.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	76,35	BB
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76,11	BB
8.	Dinas Kesehatan	75,55	BB
9.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	75,40	BB
10.	Dinas Pangan	74,75	BB
11.	BKPSDM	74,50	BB
12.	Badan Kesbangpol	74,30	BB
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	74,01	BB
14.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	73,75	BB
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	73,55	BB
16.	Dinas Pertanian	73,35	BB
17.	Dinas Sosial	73,25	BB
18.	Dinas Perhubungan	73,20	BB
19.	Dinas Pendapatan Daerah	73,05	BB
20.	Dinas Perikanan	72,76	BB
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	71,61	BB
22.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	71,50	BB
23.	Sekretariat DPRD	71,50	BB

24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,50	BB
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	70,90	BB
26.	BKAD	70,60	BB
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	70,50	BB
28.	Dinas Kebakaran	70,60	BB
29.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	69,71	B
30.	Kecamatan Wua-Wua	61,80	B
31.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60,85	B
32.	Kecamatan Poasia	59,20	CC
33.	Kecamatan Mandonga	57,65	CC
34.	Kecamatan Kendari	56,80	CC
35.	Kecamatan Kadia	55,60	CC
36.	Kecamatan Baruga	55,00	CC
37.	Kecamatan Kendari Barat	53,95	CC
38.	Kecamatan Kambu	53,00	CC
39.	Kecamatan Puuwatu	51,25	CC
40.	Kecamatan Abeli	42,71	C
41.	Kecamatan Nambo	14,41	D

Sumber: Inspektorat Kota Kendari, 2022

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa pada umumnya OPD dilingkup Kota Kendari dari segi capaian kinerja mempunyai predikat BB, sedangkan Kecamatan masih sangat rendah dengan predikat CC dan satu kecamatan dengan predikat D. tabel tersebut juga mengindikasikan masih banyak yang harus dibenahi terkait capaian Indikator Kinerja Utama setiap OPD tersebut.

Sementara itu, terkait dengan anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahunnya mengeluarkan opini laporan keuangan setiap instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Kendari. Opini dapat sedikit menggambarkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk kesembilan kalinya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK ini merupakan yang ke-9 kali sejak pertama kali diterima tahun 2013. Berikut tabel Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari sejak tahun 2013 hingga tahun 2021:

**Tabel 4.** Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari

No.	Tahun	Keterangan
1.	2013	WTP
2.	2014	WTP
3.	2015	WTP
4.	2016	WTP
5.	2017	WTP
6.	2018	WTP
7.	2019	WTP

---

8.	2020	WTP
9.	2021	WTP

---

Sumber: Road Map RB, 2022

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tahun ini cukup detail dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjadikan daerah semakin akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK merupakan hal penting bagi para kepala daerah karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat di akhir masa jabatannya.

Adapun kriteria pemberian opini BPK meliputi penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan keuangan dilakukan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Kota Kendari terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, karena BPK akan terus melakukan monitoring dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Dari segi administratif, sebagai sisi akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari LAKIP dan opini BPK, secara politik, pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LPJK). Kepala Daerah setiap tahunnya menyampaikan LPJK di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk tahun 2021, LPJK Walikota Kendari dapat diterima oleh DPRD Kota Kendari dengan beberapa rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan LKPJ yang diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berkaitan tentang penanganan Covid-19. Khususnya realisasi anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendari yang belum terpenuhi.

Akuntabilitas juga akan terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Kendari memiliki rencana untuk memperbaiki birokrasi melalui sejumlah hal seperti penyusunan grand design dan road map dari reformasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis dan standar operasi pelayanan, penerapan sistem pengendalian internal, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, serta penggunaan berbagai sistem aplikasi termasuk pelaporan keuangan dan sistem seleksi pegawai yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam memastikan berjalannya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:

- a. Mempublikasikan semua proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran kedalam website atau berbagai sarana informasi lainnya
- b. Menyusun grand design dan road map reformasi birokrasi termasuk didalamnya mencakup berbagai langkah untuk melakukan restrukturisasi organisasi,

penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan standar pelayanan, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah

- c. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel
- d. Mengoptimalkan website melalui pengembangan berbagai aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mendukung penerapan pemerintahan elektronik
- e. Membentuk forum konsultasi publik yang dapat menampung keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun pembuatan standar pelayanan
- f. Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat menjangkau seluruh masyarakat
- g. Mengembangkan website yang interaktif serta berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses website tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari cenderung telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian Kinerja OPD Dinas dan Badan yang pada umumnya berpredikat baik (BB) sedangkan OPD Kecamatan pada umumnya masih sangat rendah (Predikat CC). Terkait anggaran, pemerintah Kota Kendari juga mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Kota Kendari berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Predikat ini berhasil dipertahankan tiap tahun oleh Pemerintah Kota Kendari sejak pertama kali diperoleh yaitu pada tahun 2013. Dari segi administratif, sebagai sisi akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari LAKIP dan Opini BPK, sedangkan dari segi politik pertanggungjawaban Pemerintah Kota Kendari dapat dilihat dari diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fattah, Nanang (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: Rosda Karya
- Maleong, Lexy. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Rosda Karya Bandung
- Pasaribu. FJ.(2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara
- Suharsimi Arikunto (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta,
- Zarkasyi, M.W, )2008) Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya, Bandung: Alfa Beta

### Jurnal

- Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.10>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Mahendra, Y., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 52–63. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4 No. 1.
- Selly, R. N., & Madubun, H. (2023). Strategi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 213–224.
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Tawai, A., Muhammad Amir, & Almaidah. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 6(1), 343–354. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.126>